

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Secara yuridis formal dan sosiologi istilah kriminal atau kejahatan mempunyai pengertian yang berbeda. Dimana secara yuridis-formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, asosial sifatnya, dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. Sedangkan secara sosiologis, kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang secara ekonomis politis, dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat. Secara umum, menurut Reksohadiprojo dan Karseno (1985), ada empat kelompok kejahatan.

Pertama adalah kelompok kejahatan terhadap hak milik seperti perampokan, pencurian, pembegalan, pembakaran yang di sengaja, dan penggelapan. Kedua adalah kelompok kejahatan terhadap hak pribadi seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan penganiayaan. Ketiga adalah kelompok perilaku yang negatif menurut pandangan masyarakat seperti perjudian, pelacuran, dan narkoba. Kemudian yang keempat adalah kelompok pelanggaran seperti kerusuhan, dan pelanggaran lalu-lintas. Perbuatan yang mengarah kepada tindakan kriminal atau kejahatan tidak dengan sendirinya muncul. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi dengan sendirinya muncul. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan tersebut (Kartono, 1992).

Pada hakekatnya kejahatan timbul karena karakter manusia yang melakukan kejahatan, kemiskinan, kesempatan kerja, dan faktor lain yang membuka peluang seseorang untuk berbuat jahat seperti sedikitnya patroli polisi, keadaan jalan dan lingkungan, kepadatan penduduk, nilai harta penduduk, frekuensi ronda, dan efektifitas lembaga kejaksaan dan kehakiman (Reksohadiprodjo dan Karseno, 1985). Pendapat lain mengemukakan bahwa faktor personal, faktor sosial, dan faktor situasional dapat menyebabkan munculnya kejahatan (Separovic, 1985). Faktor personal mencakup faktor biologis (umur, jenis kelamin, mental, dan lain-lain), dan faktor psikologis (agresivitas, kecerobohan, dan keterasingan). Faktor sosial terkait dengan faktor imigran, minoritas, dan pekerjaan. Kemudian faktor situasional antara lain situasi konflik, tempat, dan waktu.

Menurut Sharp, et.al (1996), faktor utama yang cenderung menimbulkan perilaku kriminal adalah nafsu dan emosi yang tidak terkendali, kemiskinan, dan rendahnya standar nilai-nilai sosial masyarakat. Disamping faktor lain yang juga dapat menjadi pemicu munculnya tindakan kriminal.

Di Sumatera Utara berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2013; 119), tercatat peristiwa kejahatan/ pelanggaran yang dilaporkan ke pihak berwajib sebanyak 41.734 kasus. Dengan kasus terbesar adalah pencurian dengan pemberatan sebanyak 7.612 kasus, disusul oleh kasus pencurian kendaraan sebanyak 7.481 kasus serta penganiayaan berat sebanyak 3.770 kasus.

Berikut grafik 1.1 menjelaskan perkembangan peristiwa kejahatan sejak tahun 2008 hingga tahun 2012 di Sumatera Utara.



Sumber : BPS, Sumatera Utara Dalam Angka (2013;119)

Gambar 1.1. Peristiwa Kejahatan/ Pelanggaran Yang Dilaporkan di Sumatera Utara Tahun 2008 – 2012

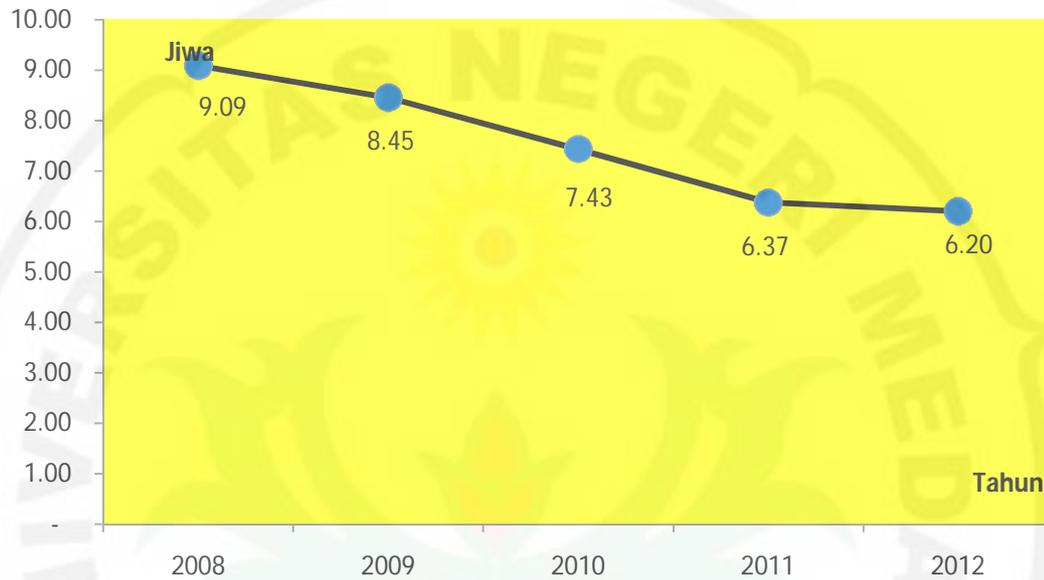
Pada gambar 1.1 menjelaskan jumlah kasus kejahatan/ pelanggaran yang dilaporkan selama tahun 2008 – 2012, dimana di tahun 2008 peristiwa kejahatan yang terjadi sebanyak 29.229 kasus. Di tahun 2009 hingga tahun 2011 peristiwa kejahatan semakin meningkat, dimana sebanyak 32.309 kasus terjadi di tahun 2009, sebanyak 39.220 kasus terjadi di tahun 2010 dan sebanyak 44.104 kasus terjadi di tahun 2011. Tahun 2012 peristiwa kejahatan menurun meskipun relatif kecil yaitu sebanyak 41.734 kasus. Sedangkan jenis kejahatan di tahun 2012 di Sumatera Utara adalah jenis kejahatan pencurian dengan pemberatan (18,24%), pencurian kendaraan (17,93%), penganiayaan berat (9,03%), penganiayaan ringan (4,91%) dan penggelapan (6,87%) sedangkan sisanya seperti pembunuhan, penculikan, kejahatan politik, perjudian, perkosaan dan lain-lain (43,02%).

Banyak faktor yang menyebabkan tingginya tingkat kejahatan di Sumatera Utara, diantaranya adalah tingkat pengangguran yang tinggi, tingkat pendidikan yang rendah, tingkat pendapatan, ketimpangan pendapatan, jumlah penduduk dan kemiskinan serta lainnya.

Tingkat pengangguran yang tinggi berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kemiskinan, kriminalitas dan masalah-masalah sosial politik yang juga semakin meningkat. Penduduk dengan tingkat pengangguran yang tinggi akan membuat lingkungan atau daerah tersebut menjadi rawan dan menimbulkan masalah sosial. Secara teori pengangguran yang tinggi akan menurunkan tingkat kesejahteraan penduduk dan akan meningkatkan kejahatan atau kriminalitas.

Tingkat pengangguran yang tinggi akan sangat rentan dengan masalah-masalah sosial, seperti kejahatan atau kriminalitas, pendidikan, kemiskinan, kesenjangan pendapatan serta masalah sosial lainnya. Tingginya penduduk yang menganggur akan meningkatkan tingginya kriminalitas yang akan terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung. Semakin tinggi tingkat pengangguran akan semakin tinggi potensi kerawanan sosial yang ditimbulkannya contohnya kriminalitas. Sebaliknya semakin rendah tingkat pengangguran maka semakin rendah kerawanan sosial yang akan ditimbulkan dalam masyarakat.

Tinggi rendahnya tingkat pengangguran di Sumatera Utara disajikan dalam grafik 1.1 berikut ini



Sumber : BPS, Sumatera Utara Dalam Angka (2013;119)

Gambar 1.2. Tingkat pengangguran di Sumatera Utara Tahun 2008 – 2012

Gambar 1.2 menjelaskan tingkat pengangguran di Sumatera Utara selama tahun 2008 hingga 2012 menunjukkan penurunan. Tahun 2008 tercatat sebesar 9,09 persen penduduk yang menganggur, meskipun tidak signifikan namun di tahun 2009 terjadi penurunan hingga mencapai 8,45 persen. Hingga tahun 2012 masing-masing sebesar 7,43 persen di tahun 2010 dan sebesar 6,37 persen di tahun 2011 serta sebesar 6,20 persen di tahun 2012.

Dampak dari tingginya tingkat pengangguran menyebabkan termarginalnya penduduk tersebut dari akses sosial seperti pendidikan, kesehatan dan lain-lain yang disebabkan ketidakmampuan ekonomi. Ketidakmampuan secara ekonomi disebabkan tingkat pendapatan yang rendah yang pada gilirannya penduduk harus

mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan.

Pengangguran yang tinggi menyebabkan timbulnya masalah kemiskinan dan masalah sosial lainnya yang dalam jangka waktu yang panjang dapat menyebabkan kekacauan politik dan sosial sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang pada gilirannya mengakibatkan menurunnya GNP dan pendapatan perkapita.

Tabel 1.1. Tingkat Pengangguran, Pendapatan Perkapita, Jumlah Penduduk dan Tingkat Kejahatan di Sumatera Utara Selama Tahun 2003 – 2012

Tahun	Tingkat Pengangguran (Persen)	Pendapatan Rill/Kapita (Rupiah)	Tingkat Kejahatan (Kriminalitas) (Kasus)
2003	14.71	6,627,667	21,043
2004	13.76	6,873,420	21,742
2005	11.98	7,130,696	24,940
2006	11.51	7,383,039	29,420
2007	10.10	7,775,393	29,601
2008	9.09	8,140,606	29,229
2009	8.45	8,420,590	32,309
2010	7.43	9,138,734	39,220
2011	6.37	9,660,415	44,104
2012	6.20	10,174,500	41,734

Sumber : BPS, 2013

Tabel 1.1 menjelaskan tingkat pengangguran di Sumatera Utara selama tahun 2003 hingga tahun 2012 menunjukkan penurunan. Tahun 2003 tercatat sebesar 14,71 persen menurun di tahun 2004 ke angka 13,76 persen, di tahun 2005 sebesar 11,98 persen menurun meskipun relatif kecil di tahun 2006 yang hanya sebesar 11,51 persen. Tahun 2007 hingga tahun 2012 terus mengalami penurunan, masing-masing sebesar 10,10 persen di tahun 2007 sebesar 9,09 persen di tahun 2008 sebesar 8,45 persen di tahun 2009 sebesar 7,43 persen di tahun 2010 dan sebesar 6,37 persen di tahun 2011 serta sebesar 6,20 persen di tahun 2012.

Sementara itu, pendapatan per kapita dan jumlah penduduk cenderung mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Pendapatan perkapita di tahun 2003 sebesar Rp. 6,627,667 terus meningkat hingga tahun 2012 menjadi sebesar Rp. 10,174,500. Sedangkan jumlah penduduk meskipun terjadi penurunan di tahun 2010, namun secara umum menunjukkan trend positif yang artinya terjadi peningkatan selama tahun 2003 hingga tahun 2012. Jika tingkat pengangguran di suatu negara relatif tinggi, hal tersebut akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi yang telah dicita-citakan.

Jika dianalisis lebih lanjut, tingkat pengangguran yang menunjukkan tren menurun, pendapatan perkapita dan jumlah penduduk yang menunjukkan pola yang terus meningkat secara umum mengurangi tingkat kriminalitas di Sumatera Utara. Namun dari data yang ada pada tabel 1.1 menunjukkan pola tingkat kejahatan/ kriminalitas yang justru terus mengalami peningkatan dari tahun 2003 hingga tahun 2012. Melihat fenomena tingkat kriminalitas yang begitu meningkat di Sumatera Utara, dan kaitannya dengan faktor yang mempengaruhinya seperti

yang tertulis dalam penjelasan sebelumnya, keadaan inilah yang membuat peneliti mengangkat judul “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kriminalitas di Sumatera Utara (Melalui pendekatan ekonomi)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana Pengaruh Pendapatan Perkapita, Tingkat Pengangguran dan Ketimpangan Pendapatan terhadap Tingkat Kriminalitas di Sumatera Utara?”

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Perkapita, Tingkat Pengangguran dan Ketimpangan Pendapatan terhadap Tingkat Kriminalitas di Sumatera Utara.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Untuk menambah wawasan dan pemantapan teori serta ilmu yang penulis peroleh selama kuliah di Magister Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Medan.
2. Sebagai bahan masukan dan tambahan informasi bagi para perencana dan pelaksana pembangunan di Sumatera Utara, khususnya yang terkait dengan masalah penelitian ini.
3. Sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan sumber referensi bagi peneliti yang berminat dengan pembahasan yang sejenis di masa mendatang.